

# ***E-Government Dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance***

*Junaidi*

## **ABSTRACT**

*Need for reform in public sector should become leverage point for reform of public administration. Implementation process of public administrative reform is not easy task. It needs clear and directive concept related to target, strategy, approach or model selected. The concepts require tools allowing them implemented easily, accessible by many people, quick, inexpensive and convenient. So, e-government may be said as the most appropriate solution.*

*Author argues that efforts to develop e-government in public administration should be placed in true context; that is, development of e-government should be viewed as tool to accelerate implementation of public administrative reform in order to realize good governance. This paper content contain model of e-government development in context of public administrative reform toward good governance.*

*In the last part, author gives recommendation for central and local government that will develop e-government: development of e-government should be done with clear concept of e-government development related to target and strategy or approach written in a blue print or, in term of Inpres No.3/2003, strategic plan of e-government, which is established considering rationality aspect and democratic process.*

**Key words: administrative reform, good governance, and e-government .**

## **PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini upaya pengembangan *e-government* sedang giat-giatnya dilakukan kalangan birokrasi publik. Kecenderungan birokrasi publik seperti departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah propinsi, kota dan kabupaten, menerapkan *e-government* dalam sistem tata pemerintahan patut diperhatikan dan menarik untuk dikaji.

Meningkatnya gairah instansi pemerintah menerapkan *e-government* dapat dilihat sebagai komitmen pemerintah (pusat atau daerah) dalam upaya mengantisipasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini. khususnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung

penyelenggaraan sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Sementara itu, masyarakat juga cenderung responsif terhadap fenomena ini. Pers misalnya yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar demokrasi, telah menunjukkan langkah nyata dalam mendorong pengembangan *e-government* melalui serangkaian kegiatan pemberian penghargaan bagi lembaga sektor publik yang dianggap memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan *e-government*.

Bentuk apresiasi masyarakat (pers) terhadap upaya pengembangan *e-government* di Indonesia, diberikan

dalam bentuk penghargaan, seperti yang dilakukan oleh Majalah Warta Ekonomi, dengan "Warta Ekonomi *E-Government Award 2002*" kepada lima instansi pemerintah dan daerah. Pemberian penghargaan ini terus berlanjut hingga tahun ketiga yaitu tahun 2004 (lihat Tabel 1).

Besarnya komitmen instansi pemerintah dan daerah menerapkan *e-government* dalam sistem pemerintahannya serta adanya apresiasi masyarakat yang tinggi dalam mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya melalui pemberian penghargaan *E-government Award*, merupakan langkah maju bagi proses pembaharuan di sektor publik.

**Tabel 1. Para Pemenang Warta Ekonomi E-Government Award 2002- 2004**

KATEGORI	PERINGKAT	PEMENANG WARTA EKONOMI E-GOVERNMENT AWARD		
		TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Departemen/ Kementerian	I	- Dept. Kimpraswil	- Dept. Pendidikan Nasional	- Dept. Kimpraswil
	II	- Dit Jendral Bea dan Cukai	- Dept. Dalam Negeri	- Depdagri
	III	- Dit Jendral Dikti	- Kementerian Koord. Polkam	- Dept. Pertanian
Lembaga Pem. Non Departemen	I	- Bank Indonesia	- Bank Indonesia	- Bank Indonesia
	II	- Badan Kel. Berencana Nasional	- Bakor Survei dan Pem Nas	- Badan Pusat Statistik
	III	- Bawas Obat dan Makanan	- Badan SAR Nasional	- Perpustakaan Nasional
Pemerintah Propinsi	I	- Prov. Jawa Timur	- Prov. DI Yogyakarta	- Prov. DI Yogyakarta
	II	- Prov. DKI Jakarta	- Prov. Kaltim	- Prov. Jawa Timur
	III	- Prov. Riau	- Prov. Sulawesi Utara	- Prov. Sulawesi Utara
Kabupaten/ Kota	I	- Kab. Berau	- Kot. Tarakan	- Kab. Kebumen
	II	- Kab. Garut	- Kab. Kutai Timur	- Kot. Bogor
	III	- Kot. Bontang	- Kot. Denpasar	- Kab. Kutai Timur
Lembaga Lain Yang Relevan	I		- Bapepam	
	II		- Pusat Energi Dep. ESDM	
	III		- Ditjen Listrik dan Penge Energi Dep. ESDM	
Best of The Best Special Achivement				- Dep Kompraswil - Kota Surabaya

Sumber: Diolah dari *Warta Ekonomi*, 25 Agustus 2004, XVI (17), 10 September 2003, XV (18), 25 September 2002, XIV (22).

Namun pertanyaannya adalah apakah upaya pengembangan *e-government* tersebut sudah ditempatkan pada konteks yang benar. Di samping itu patut dipertanyakan juga apakah pengembangan *e-government* tersebut sudah dilakukan dengan konsep yang jelas.

### **KONSEPS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT**

Beragam makna yang dikemukakan baik itu oleh institusi non pemerintah atau institusi pemerintah terhadap konsep *e-government*.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu :

*“E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”* (dalam Idrajit, 2002:2)

Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu :

*“E-government is a global reform movement to promote Internet use by government agencies and everyone who deals with them* (dalam Idrajit, *ibid*).

Definisi yang lebih lengkap dinyatakan oleh World Bank atau Bank Dunia yaitu:

*“E-government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet,*

*dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan atau pengurangan biaya”* (dalam Achmad Djunaedi, 2002:2).

Italy mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan detail dalam mendefinisikan *e-Government*, yaitu:

*“The use of modern ICT in the modernization of our administration, which comprise the following classes of action:*

- 1. Computerization, designed to enhance operational efficiency within individual departemens and agencies;*
- 2. Computerization of service to citizen and firms, oten implying integration among the services of different departemens and agencies;*

3. *Provision of ICT access to final users of government services and information*" (dalam Idrajit, ibid).

Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa pengertian *e-government* sangat bervariasi. Walaupun terdapat definisi yang berbeda-beda, namun dalam definisi di atas terdapat beberapa kesamaan dalam hal karakteristik dari *e-government* yaitu :

1. Merupakan suatu **mekanisme interaksi baru** (modern) antara pemerintah, masyarakat, dan swasta atau kalangan yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ICT (terutama internet) sebagai **alat**.
3. **Tujuan** adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
4. Adapun obyeknya adalah layanan pemerintah.

Upaya pengembangan *e-government* dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau tingkatan. Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *e-government*. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :

1. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit

anatomi sebuah aplikasi *e-government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan

2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya (Indrajit, 2002:29).

Berdasarkan dua aspek di atas, maka tingkatan layanan *e-government* sebagaimana terlihat pada Bagan 1.

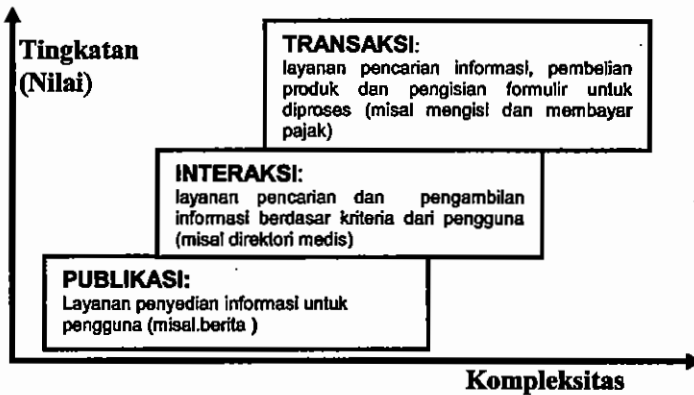
Gambar tersebut menunjukkan ada tiga tingkatan layanan utama dalam *e-government* yaitu: *Publish, Interact*, dan *Transact* (Indrajit, 2003: 29-32). Tingkatan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk melihat seberapa besar kemampuan pemerintah memanfaatkan secara optimal dari teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pada intinya *electronic government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), GTB (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Government to Government/inter-agency relationship*). Ada juga yang menambahkan satu lagi bentuk relasi tersebut yaitu G2E (*Government to Employees*). Adapun bentuk interaksi antar pelaku seperti pada Bagan 2 berikut ini:

Kehadiran *e-government* dalam sistem tata pemerintahan dalam berbagai tingkat pada dasarnya adalah solusi bagi masalah-masalah pemerintahan seperti adanya kelambanan dalam pelayanan publik akibat adanya hirarkhi yang panjang dan prosedur yang kompleks; kualitas kebijakan yang buruk yang diakibatkan

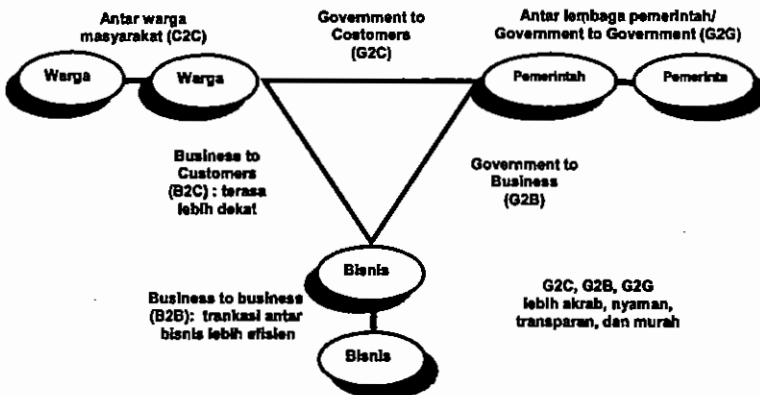
oleh informasi tidak tersedia pada saat dibutuhkan, manajemen informasi yang buruk serta alur informasi hanya bersifat vertikal dan tidak horizontal; KKN dan kebocoran yang tinggi akibat efektivitas pengawasan dan monitoring yang rendah; dan adanya investasi dari luar yang rendah sebagai akibat dari tidak tersedianya data potensi sumberdaya dan

**Bagan 1 : Tingkatan Layanan E-Government**



Sumber: PIU UK 2000, Fig.4.1 dalam Achmad Djunaedi, 2003. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Hal.4

**Bagan 2: Tipe Relasi dalam E-government**



Sumber: Djunaedi, Achmad, 2003. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hal.2)

pasar tidak tersedia serta biaya investasi yang tinggi.

Adanya *e-government* ini menurut Agus Dwiyanto (2003) akan memberikan manfaat yaitu: *e-government* menyederhanakan hirarkhi dan memperbaiki kualitas informasi sehingga hubungan antara bawahan menjadi terbuka dan langsung, kualitas dan kecepatan informasi menjadi lebih baik, pengambilan keputusan bisa memanfaatkan informasi secara optimal, dan respon pemerintah menjadi lebih baik dan tepat; *e-government* memperbaiki kualitas kebijakan dan legitimasi pemerintah meningkat, sehingga kebijakan pemerintah menjadi *information-based* dan efektif; *e-government* membantu mengorganisir data, menganalisis, dan memperbaharui data secara lebih mudah sehingga informasi mengenai potensi daerah bisa diperoleh dengan mudah; *e-government* membuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan pelayanan menjadi tak terhindarkan; dan *e-government* mempercepat terwujudnya *good governance*.

Suksesnya pelaksanaan *e-government* di suatu pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Garnham (2000) memperkirakan faktor non teknis seperti adanya visi, misi, sasaran, dan strategi yang dinyatakan dengan jelas dan dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan

nasional lebih dominan dalam mempengaruhi keberhasilan *e-government* dari pada faktor teknis (dalam Setiyadi, 2003:8).

Bila visi, definisi dan *leadership* sudah dimiliki, faktor berikut yang menentukan dalam suksesnya implementasi *e-government* adalah kesepakatan mengenai *sasaran* yang ingin dicapai dengan *e-government*. Kejelasan *sasaran* dan pemahaman serta konsistensi semua pelaku terhadap tercapainya *sasaran* inilah yang perlu disepakati sejak awal suatu pemerintah merencanakan membangun *e-government*. Kalau tidak, yang akan terbentuk adalah aplikasi-aplikasi telematika yang dibangun tanpa mengindahkan harmonisasi dan sinergi dengan elemen pemerintah lainnya.

Selain itu, faktor keberhasilan lainnya adalah adanya strategi implementasi yang jelas. Kemampuan menentukan strategi dan sekaligus mengendalikan sumber daya ketika menjalankan *e-government* menjadi faktor pendukung sukses tidaknya implementasi *e-government*. Beberapa strategi tersebut yaitu (1) Strategi Integrasi Proses dan Teknologi, (2) Strategi yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi, (3) Strategi yang berkaitan dengan upaya Demokratisasi, (4) Strategi yang berkaitan dengan upaya membangun komunitas, (5) Strategi yang berkaitan dengan upaya membangun koordinasi

intra dan antar-instansi pemerintah, (6) Strategi yang berkaitan dengan perlunya tersedia kebijakan pendukung, (7) Strategi yang berkaitan dengan upaya penyediaan infrastruktur Internet dan aplikasi *e-government* (lebih lengkap lihat Setiyadi, 2003:11-13).

Sementara itu, menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2003:15).

**Pertama, support.** Tanpa adanya unsur *political will* ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top down*, maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :

1. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara atau pemda dalam mencapai visi dan misi bangsa atau daerahnya sehingga

harus diperhatikan prioritas tinggi sebagaimana kunci –kunci sukses lain diperlukan.

2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung pencipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (sepertinya adanya regulasi yang jelas).
4. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

**Kedua, Capacity.** Yang dimaksud elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait dengan menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*.

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan/kontrak (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

**Ketiga, Value.** Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah

kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar-benar memberikan manfaat (*value*) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-government*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah *nexus* atau pusat syaraf jaringan *e-government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan.

Kelahiran *e-government* di Indonesia dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No.23/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Walaupun demikian, jauh sebelum adanya Inpres No.23/2003 lahir, beberapa pemerintah daerah sudah terlebih dahulu menggagas serta menerapkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-government* dalam skala terbatas. Pemerintah Kabupaten Takalar di Propinsi Sulawesi Selatan tampil sebagai daerah pelopor pertama penerapan teknologi informasi atau *e-government* di tingkat pemerintah daerah. Kabupaten Takalar mulai menerapkan Teknologi Informasi melalui sebuah bentuk Sistem yang



dinamakan Sistem Pelayanan Satu Atap atau disingkat SIMTAP sejak tahun 2000 (Ibrahim Syah, 2003).

Pada Tahun-tahun berikutnya, sejumlah daerah yang memiliki APBD berlimpah membangun infrastruktur *e-government* secara lengkap, seperti Kabupaten Kutai Kertanegara. Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur ini mengeluarkan dana milyaran rupiah untuk membangun Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP). Begitu juga dengan pemerintah propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kota Bogor di Jawa Barat, Kota Tarakan di Sulawesi, Kota Denpasar di Bali, Kota Jogjakarta di DIY Yogyakarta dan lain-lain. Sementara itu, pulau Sumatera tengah mencanangkan *Sumatera Online* untuk mengintegrasikan sembilan propinsi dalam satu atap.

Meski sebagian instansi pemerintah dan daerah tengah memacu diri menerapkan *e-government*, bukan berarti semuanya melakukan hal demikian. Ada banyak instansi atau daerah lain yang belum terjamah *e-government*. Gebyar *e-government* di Kawasan Indonesia Timur seperti NTB, NTT dan Papua belum marak. Malah ada juga daerah yang belum memiliki *website*.

Sejak Inpres No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* diluncurkan 9 Juni 2003 lalu,

implementasi *e-government* di Indonesia mulai terasa gaungnya. Setidaknya, penerapan *e-government* telah memiliki pijakan sekaligus lebih terarah. Sebab, dalam Inpres itu, para pejabat teras diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Yang tak kalah pentingnya, mereka diminta untuk merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut di lingkungan masing-masing sembari berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Sebagai lembaga yang ditunjuk menggodok kebijakan seputar TI, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah membuat panduan dan standar untuk menindaklanjuti Inpres No.3 /2003. Ada beragam panduan yang telah disosialisasikan, seperti Panduan Penyelenggaraan Situs (*Website*) Pemerintah Daerah, Panduan Standar Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga, hingga Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang *e-Government*.

Sampai saat ini, menurut Djoko Agung Harijadi, asisten deputy *e-government* Kominfo (Rozy Faizah, 2004), Kominfo masih menggodok Standar Mutu dan Jangkauan

Pelayanan serta Pengembangan Aplikasi (*e-services*), Kebijakan tentang Kelembagaan, Otorisasi, Informasi, dan Keikutsertaan swasta dalam Penyelenggaraan *e-government*; Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan; Panduan tentang Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran *E-government*; serta Standar Kompetensi Pengelolaan *E-government*. Selain itu, saat ini, Kominfo juga tengah menyiapkan Sistem Pertukaran Data Antar Instansi Pemerintah (*intergovernment access share information system, IGASIS*).

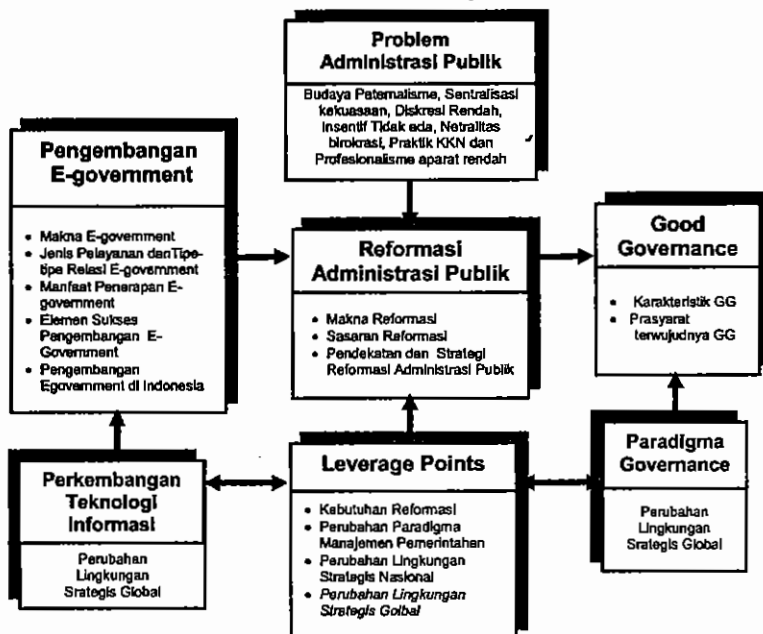
Penjelasan secara konseptual dari *good governance* dan pengembangan *E-government* di atas, menunjukkan kepada kita bahwa pada

prinsipnya konsep-konsep tersebut memiliki dimensi yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang cukup erat antara satu konsep dengan konsep yang lain. Penjelasan di atas kalau disarikan dalam sebuah Model Pengembangan *E-government* dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik menuju *Good Governance* akan nampak seperti pada Bagan 3 di bawah ini.

**PENUTUP**

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan di sektor publik hendaknya menjadi *leverage points* bagi Reformasi Administrasi Publik. Menjalankan proses Reformasi Administrasi Publik tentu bukanlah pekerjaan yang ringan. Dibutuhkan konsep yang jelas dan terarah baik menyangkut sasaran, strategi,

**Bagan 3 : Model Pengembangan E-government dalam Bingkai Refomasi Administrasi Pubik Menuju Good Governance**



Sumber: diolah oleh Junaidi, 2005.

pendekatan atau pun model yang dipilih. Untuk berbagai konsep tersebut dibutuhkan *tools* yang memungkinkan diterapkannya berbagai konsep di atas secara mudah, terjangkau banyak orang, cepat, murah dan *convinient*. Untuk itu *e-government* pada saat ini dapat dikatakan merupakan salah satu jawaban yang paling tepat.

Keberadaan *e-government* hanya merupakan alat bantu untuk menjalankan, mempercepat dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks Reformasi Administrasi Publik, Upaya pengembangan *E-government* dalam sistem tata pemerintahan seyogyanya ditempatkan pada konteks yang benar yakni pengembangan *e-government* hendaknya dilihat sebagai alat (*tool*) untuk mempercepat proses pelaksanaan Reformasi Administrasi Publik demi terwujudnya *good governance*.

Kepada instansi pemerintah dan daerah yang akan melaksanakan pengembangan *E-government*, disarankan untuk memiliki konsep pengembangan *E-government* yang jelas baik menyangkut sasaran, strategi serta pendekatan yang tertuang dalam sebuah *Blue Print* atau dengan bahasa Inpres No.3/2003 yakni Rencana Strategis Pengembangan *E-government*, yang disusun dengan memperhatikan aspek rasionalitas dan proses yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief Mochamad dan Nurdiana, 2004, "Methodologi Menilai E-government di Indonesia", *Warta Ekonomi*, 16 (17), 25 Agustus: 86-87.

—————, 2003, Methodologi Riset: Potret E-government Kita, *Warta Ekonomi*, XV (18), 10 September: 46-49.

Devi, Ade Rachmawati, dkk, 2002, Hasil Penilaian *Web-site* dari beberapa Kategori Lembaga Pemerintah Indonesia, *Warta Ekonomi*, XIV (22), 25 September: 38-42.

Djunaedi, Achmad, 2003, Beberapa Pemikiran Penerapan e-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia, makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional E-Government dan Workshop Linux*, 30 Oktober 2002, FMIPA UGM, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, 2004, Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance, makalah disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, 21 Agustus 2004, Majelis Guru Besar UGM, Yogyakarta.

—————, 2003, Revitalisasi Pemerintahan Melalui E-Government, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Nasional Strategi dan Tahapan Implementasi E-Government Untuk Pemda*, 9 - 11

- Oktober 2003, Gama Technocamp UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ & Bevaola Kusumasari, 2001, *Kinerja Pelayanan Publik, Policy Brief*, (1): 1-4
- Effendi, Sofian, 2002, Pengembangan Good Governance dan E-Government di Era Otonomi, dalam Azhari, Idham, Ibtu (Ed), *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyosong AFTA Tahun 2003)*. Kerjasama antara Prosumen (PKPEK) dengan FORKOMA - MAPUGM, hlm.111-121.
- Indrajit, Richardus Eko, 2002, *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Tehnologi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.*
- Imawan, Riswandha, 2002, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, *Jurnal Ilmu Politik*, 18: 3-10
- Kasim, Azhar, 2000, Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah dalam Rangka Reformasi Administrasi Publik di Indonesia, *Bisnis dan Birokrasi*, I (1): 19-29.
- LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance : Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Prasojo, Eko, 2003, Agenda Politik dan Pemerintahan di Indonesia : Desentralisasi Politik, Reformasi Birokrasi dan Good Governance, (1): 37-51
- Rozy, Faizah & Andy Zoetom, 25 Agustus 2004, Menapak Tahapan Transaksi, Mana Jaminan Hukumnya ?, *Warta Ekonomi*, XVI (17): 78-81
- Santoso, Mas Achmad, 2003, Agenda Pembaharuan Hukum Nasional dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi*, 25 - 27 September 2003, UGM, Yogyakarta.
- Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, 2003, *Faktor Sukses Implementasi E-Government*, (www.gipi.or.id).
- Syah, Ibrahim, Juni 2003, Jangan Main-main dengan E-government, *Bisnis Indonesia Regional Timur*, hlm.1-2.
- Thoha, Miftah, 2004, Visi dan Strategi Politik dan Pemerintahan, Tantangan dan Kebijakan Membangun Tata Pemerintahan Yang Amanah, makalah disampaikan dalam *Konvensi Kampus Untuk Masa Depan Indonesia*, 20-22 Mei 2004, Forum Rektor-UGM, Yogyakarta

- , 2004, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, makalah disampaikan dalam *Diskusi PPSK*, 1 Juli 2004, PPSK, Yogyakarta.
- , 2004, Reformasi Birokrasi Pemerintah, makalah disampaikan dalam *Seminar Good Governance Bappenas*, 24 Oktober 2002, Bappenas, Jakarta.
- , 1996, Restrukturisasi dan Revitalisasi Administrasi Negara dalam Menyongsong Era Globalisasi, *Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum Pada Program Pasca Sarjana LAN-UNPAD*.
- Utomo, Warsito, 2003, *Dinamika Administrasi Publik, Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik*, MAP UGM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 1998, Pengertian Reformasi, *Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun 1998*
- , 1999, Reformasi Sebagai Planned Change, *Kedaulatan Rakyat*, 13 Desember.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Zauhar, Soesilo, 1996, *Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta.